



## Isu dan Permasalahan

Meskipun KPU RI menilai penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 tahap ketiga, 19 April 2025 berjalan aman dan lancar, di lain pihak diharapkan keseluruhan PSU segera tuntas karena jika berlarut-larut akan membebani daerah. Daerah akan mengalami kekosongan pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat dalam waktu cukup lama jika hasil PSU terus digugat. Anggaran yang harus disediakan untuk PSU, di tengah masa efisiensi anggaran pun akan terbebani ruang fiskal daerah. Untuk menyelenggarakan PSU Pilkada sesuai putusan MK dibutuhkan dana hampir Rp1 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan itu sejumlah daerah menghadapi berbagai kendala. PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, misalnya, baru memperoleh kepastian diselenggarakan setelah di atasinya pencairan anggaran PSU Rp32,1 miliar yang tertunda.

Hingga Jum'at, 18 April 2025, terdapat 9 daerah yang telah menyelenggarakan PSU. Sisanya, sebanyak 15 daerah yang belum melaksanakan PSU, pada Sabtu, 19 April 2025, ada 8 daerah yang menyelenggarakan PSU. Daerah yang melaksanakan PSU di tahap tiga ini, yaitu: Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Pasaman (Sumatera Barat), Tasikmalaya (Jawa Barat), Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Bengkulu Selatan (Bengkulu). Sementara itu, PSU di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dijadwalkan maju menjadi 16 April 2025, dari semula 19 April 2025. PSU di Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan di 818 TPS yang tersebar pada 283 desa/kelurahan dan 23 kecamatan, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 327.357 pemilih.

Melihat adanya sejumlah daerah yang hasil PSUnya digugat kembali ke MK, Kemendagri khawatir jalannya pelayanan publik di daerah bisa menjadi lambat. Sampai saat ini, terdapat 7 daerah yang hasil PSU Pilkada 2024 digugat ke MK. Ketujuh daerah yang hasil PSU Pilkadaanya digugat itu adalah Kabupaten Siak (Riau), Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah), Kabupaten Puncak Jaya (Papua Tengah), Kabupaten Taliabu (Maluku Utara), Kabupaten Buru (Maluku), Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), dan Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara). PSU Barito Utara dan Siak dilaksanakan pada 22 Maret 2025, sementara di Pulau Taliabu, Buru dan Banggai pada 5 April 2025, serta rekapitulasi ulang di Puncak Jaya. Adapun PSU di Kepulauan Talaud diselenggarakan pada 4 April 2025. KPU mencermati duduk perkara yang termuat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, Bawaslu memetakan kerawanan PSU Pilkada 2024 tahap ketiga yang diselenggarakan pada 16 dan 19 April 2025. Potensi rawan yang menjadi perhatian ini meliputi pemilihan dengan kotak kosong, tensi dan konflik antarpemilihan, hingga pelanggaran PSU, seperti halnya politik uang. Untuk mengawal PSU ini, Bawaslu telah membangun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan kerja sama berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, aparat keamanan juga berkontribusi dalam mengawasi dan menangani pelanggaran dalam proses pemilihan. Peran berbagai pihak diperlukan untuk memastikan PSU berjalan lancar setelah kerawanan ini dipetakan.

Para ASN setempat dan para kepala desa diingatkan untuk menjaga prinsip netralitas dan kondusivitas dalam menyambut PSU. Beberapa daerah memang bermasalah dengan netralitas.

Bawaslu menilai, karena angka partisipasi pemilih menurun, disarankan agar KPU terutama kabupaten/kota dan provinsi mendorong lebih masif masyarakat melalui sosialisasi kepada pemilih berkenaan hari pemungutan suara. Sosialisasi diharapkan melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu pemda, misalnya, partisipasi pemilih dalam PSU Pilkada Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Rabu, 16 April 2025, terpantau menurun. Penyelenggaraan PSU yang dimajukan dari seharusnya Sabtu, 19 April 2025, menjadi Rabu, 16 April 2025, ternyata menurunkan antusiasme masyarakat. Warga yang sehari-hari berprofesi sebagai petani terpaksa harus libur menggarap sawah karena menggunakan hak suaranya di PSU. Dari 400an warga yang ada dalam DPT di TPS 002, Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, hanya tercatat 200an warga yang hadir menggunakan hak pilih di tanggal 16 April 2025. Warga banyak yang enggan datang ke TPS karena merasa sudah menggunakan hak suaranya pada 27 November 2024.

## Atensi DPR

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat melakukan kunjungan dalam rangka supervisi dan monitoring PSU Pilkada 2024 ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 19 April 2025, berharap agar daerah tersebut segera mendapatkan pemimpin definitif pada PSU Pilkada tersebut. Momentum ini dinilai saatnya masyarakat menentukan pilihan, dan daerah harus memiliki pemimpin untuk jalannya roda pemerintahan. PSU yang kini memasuki tahap tiga dan masih akan berlanjut ke depannya, maka penting kiranya bagi DPR RI melalui Komisi II melaksanakan fungsi pengawasannya dengan mendorong pihak pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait langkah-langkah penanganan masalah-masalah yang muncul, terutama dalam konteks kemungkinan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti halnya adanya gugatan ke MK terhadap beberapa PSU, isu politik uang, partisipasi pemilih, serta soal netralitas ASN dan kepala desa. Di samping itu, soal sumber daya penyelenggaraan PSU, utamanya anggaran dan petugas, serta koordinasi dengan pihak pemda, TNI dan Polri setempat berkenaan keamanan daerah.

## Sumber

antaranews.com, 19 April 2025;  
Kompas, 15, 16, 19 April 2025;  
kpu.go.id, 17 April 2025;  
news.detik.com, 20 April 2025;  
Raker dan RDP Komisi II DPR RI, 10 Maret 2025; dan  
tempo.co, 18 April 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making